

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan indeks Wang & Guan (2017) yang memadukan dua dimensi utama, yaitu akses dan penggunaan layanan keuangan, serta melakukan pengelompokan provinsi menggunakan analisis tipologi klassen berdasarkan nilai IIK dan pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai laju pertumbuhan.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara nasional, nilai IIK mengalami tren penurunan tipis dari tahun 2020 hingga 2023, dengan nilai rata-rata sebesar 0,2320. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori inklusi keuangan rendah berdasarkan klasifikasi dari Sarma (2015). Wilayah Pulau Jawa secara konsisten menjadi kawasan dengan nilai indeks tertinggi, didorong oleh infrastruktur ekonomi dan keuangan yang lebih mapan, sedangkan daerah lainnya rata-rata cenderung tertinggal yang mengidentifikasi perlunya perhatian lebih dalam pembangunan sistem keuangan inklusif.

Melalui analisis tipologi klassen, diketahui bahwa tidak ada provinsi yang masuk ke dalam kuadran I dengan tingkat inklusi keuangan dan laju pertumbuhan yang tinggi. Sebagian besar provinsi masuk ke dalam kuadran IV yang berarti memiliki inklusi keuangan dan laju pertumbuhan rendah. Sedangkan kuadran II diisi oleh seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dengan tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Adapun kuadran III diisi oleh provinsi-provinsi yang mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya aktivitas ekonomi, namun masih rendah dalam inklusi keuangan. Ketimpangan spasial ini memperkuat urgensi strategi kebijakan inklusi keuangan yang berbasis kewilayahan dengan fokus pada peningkatan layanan keuangan formal di daerah dengan indeks rendah dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal.

Dengan demikian, kesenjangan inklusi keuangan di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pembangunan inklusi keuangan

harus dilihat tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga dari sisi penggunaan aktif terhadap layanan keuangan yang membutuhkan dukungan literasi keuangan, digitalisasi, serta reformasi sistem keuangan mikro secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran sesuai dengan kuadran masing-masing provinsi sebagai berikut:

1. Agar provinsi dapat masuk ke kuadran I maka diperlukan penguatan peran inklusi keuangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nyata. Di antaranya dengan memastikan akses keuangan yang luas tidak hanya bersifat administratif (kepemilikan rekening), tetapi juga produktif (pemanfaatan kredit, asuransi, dan investasi untuk sektor riil). Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan akan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. Provinsi-provinsi pada kuadran II, disarankan untuk memperkuat keterhubungan sektor keuangan dengan sektor riil melalui pengembangan skema pembiayaan inklusif bagi UMKM, memperluas pembiayaan hijau (*green financing*) agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, serta mendorong digitalisasi transaksi ekonomi lokal. Dengan cara tersebut, tingkat inklusi keuangan yang sudah tinggi dapat lebih optimal dalam mendorong kinerja ekonomi.
3. Strategi utama untuk provinsi yang berada pada kuadran III, yaitu memperluas akses layanan keuangan yang mampu mengimbangi dinamika pertumbuhan ekonomi dengan cara peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi berbasis komunitas, perluasan jaringan agen laku pandai di wilayah terpencil, serta pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) untuk memperkecil hambatan geografis. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga memberikan dampak inklusif bagi masyarakat.
4. Sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang rendah, provinsi yang berada pada kuadran IV perlu adanya kebijakan afirmatif yang bersifat fundamental dengan menekankan kepada pembangunan infrastruktur fisik dan digital, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta perluasan akses layanan keuangan dasar (tabungan, kredit mikro, dan asuransi).

Intervensi ini penting agar provinsi-provinsi tertinggal dapat keluar dari perangkap pertumbuhan rendah dan inklusi rendah yang berpotensi melanggengkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Dengan adanya saran di atas, diharapkan masing-masing provinsi pada masing-masing kuadran dapat semakin menuju laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai dengan tingkat inklusi keuangannya yang tinggi juga.

5.3 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan indikator dalam masing-masing dimensi terbatas pada ketersediaan data sekunder yang bersifat agregat. Dengan demikian, indeks yang dihasilkan belum mencerminkan aspek menyeluruh dari inklusi keuangan.
2. Metode pengelompokan menggunakan tipologi klassen hanya bersifat deskriptif dan kategorikal. Meskipun berguna untuk segmentasi awal, metode ini belum mampu menjelaskan hubungan kausal atau pengaruh antar variabel yang diteliti.
3. Peneliti ini hanya menggunakan data selama empat tahun (2020-2023). Rentang waktu yang relatif pendek ini dapat membatasi analisis tren jangka panjang serta sensitivitas terhadap perubahan struktural yang memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat dampaknya, terutama dalam konteks pembangunan inklusi keuangan yang bersifat gradual dan institusional.
4. Penelitian ini hanya berfokus untuk mengukur nilai IIK dan tidak melihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Keterbatasan ini dapat menjadi penelitian lanjutan untuk menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan nilainya atau bagaimana nilai ini dapat mempengaruhi variabel terikat.
5. Penelitian ini baru berfokus pada skala nasional, yaitu Indonesia sehingga tidak melihat bagaimana dinamika yang terjadi di kota/kabupaten masing-masing provinsi.

Dengan adanya keterbatasan studi ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik dengan analisis yang lebih tajam. Adapun pemilihan waktu lebih baru dan tempat diharapkan pada skala yang lebih sempit seperti provinsi, sehingga dapat melihat bagaimana pula dinamika tingkat inklusi keuangan di provinsi yang diteliti. Harapannya penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian-penelitian berikutnya yang dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia pada umumnya dan masing-masing provinsi pada khususnya.

